

## **ALASAN PENUNDAAN *TEMPORARY PROTECTED STATUS* OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP IMIGRAN FILIPINA PADA TAHUN 2013**

**Ansor Budiman<sup>1</sup>**  
**Nim. 1302045098**

### ***Abstract***

*Temporary Protected Status (TPS) is a temporary immigration status awarded to people who happen to be in the United States (U.S.) during a period when their home country becomes unsafe for return. Individual immigrants can apply for TPS only after their country is placed on the TPS list by the U.S.. On November 8<sup>th</sup> 2013, Typhoon Yolanda hit the Philippines. The devastating impact makes the Philippines a well-suited candidate for TPS designation. The aim of this research is to describe the reasons of the U.S postpone granting TPS to the Philippines. In this research the authors use the concept of National Interest and Migrations concept that are used to perform the analysis in this study. The results showed that the U.S government reason to postpone granting TPS is based on the national interests of U.S., where the U.S government considers that granting TPS is contrary to the primary interests related to economic and sovereignty; variable interest related to the use of TPS has been the subject of some debate; and general interest related to the U.S. image and diplomatic relations with the Philippines.*

**Keywords :** *Temporary Protected Status, Immigrant, National Interest*

### **Pendahuluan**

Di era globalisasi ini terjadinya perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain semakin meningkat, namun hal ini menjadi masalah saat imigran tersebut tidak dapat kembali ke negara asalnya karena masalah tertentu, seperti konflik bersenjata atau bencana alam. Terkait hal ini beberapa negara menyikapi masalah tersebut dengan kebijakan yang berbeda, sebagaimana yang disikapi Amerika Serikat (AS) dalam bentuk kebijakan *Temporary Protected Status* (TPS).

TPS berdasar pada konsep "*Safe Haven*" yang digunakan untuk merangkul setiap *humanitarian migrants*, yaitu orang yang melakukan emigrasi ke AS karena berbagai faktor seperti kemiskinan ekstrim, deprivatisasi, kekerasan, dan dislokasi akibat kelaparan ataupun bencana alam yang dapat menimbulkan sebuah respon kemanusiaan. *Safe Heaven* merupakan sebuah bentuk dari blanket relief karena berpremis pada

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman. Email : ansor.budiman@gmail.com

kondisi yang lebih umum sehingga dapat merangkul para migran yang tidak memenuhi definisi yang sempit terkait pengungsi.

TPS dapat dikeluarkan oleh *Sekretaris dari Department of Homeland Security (DHS)* bersama konsultasinya dengan Sekretaris Negara untuk periode 6 sampai 18 bulan dan bisa diperpanjang jika kondisi belum berubah. DHS dapat menunjuk suatu negara untuk mendapatkan TPS dikarenakan beberapa kondisi berikut: (1) Terjadinya konflik bersenjata (seperti perang sipil); (2) bencana alam (seperti gempa bumi atau badai), atau sebuah epidemik; (3) kejadian luar biasa dan kondisi-kondisi sementara lainnya. (uscis.gov) Pemberian TPS ini bertujuan melindungi para imigran asing yang belum dapat kembali ke negara asalnya akibat sebab-sebab tersebut, sehingga tetap dapat tinggal dan bekerja di AS dalam waktu kurun waktu tertentu.

Tabel 1.1 Daftar negara yang menerima TPS sampai tahun 2013 - 2015.

<b>Negara</b>	<b>Alasan Pemberian</b>	<b>Estimasi Penerima</b>
El Salvador	Gempa Bumi	204,000
Guinea	Ebola	2,000
Haiti	Gempa Bumi	50,000
Honduras	Topan Mitch	61,000
Liberia	Ebola	4,000
Nepal	Gempa Bumi	10,000-25,000
Nicaragua	Topan Mitch	2,800
Sierra Leone	Ebola	2,000
Somalia	Konflik	270
Sudan Selatan	Konflik	50-200
Sudan	Konflik	450
Suriyah	Konflik	5,000
Yaman	Konflik	500- 2,000

(Sumber : *Congresional Research Service Report*)

Orang-orang Filipina mulai memasuki AS pada tahun 1899 karena terjadinya aneksasi AS terhadap Filipina, sehingga mereka dimudahkan dengan status nasionalnya sebagai warga AS. Kemerdekaan Filipina tahun 1945 berdampak terhadap pembatasan imigran dari Filipina menjadi hanya 50 orang pertahun, kemudian pada tahun 1946 kuota tersebut dinaikkan menjadi 100 orang karena AS melihat Filipina sebagai aliansinya di perang dunia kedua, selanjutnya imigran Filipina di AS melonjak dari 10,500 pada 1960 (1,1% dari total imigran) menjadi 1,844,000 pada tahun 2013 (4,5%). (migrationpolicy.org)

Pada 6 November 2013 Filipina mengalami salah satu badai terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah Filipina yaitu badai Yolanda (Haiyan). Badai ini mengakibatkan 6,300 orang meninggal dunia, 1,062 orang menghilang, 4,700,539

orang dievakuasi, dan 1,140,332 unit rumah rusak. Perkiraan total kerusakan dan kerugian dari seluruh sektor mencapai 2,963,010,938 USD. (NDRMC 2013:62).

Ditengah upaya Filipina memperbaiki kerusakan sebagai dampak dari badai tersebut lebih dari 300.000 orang imigran Filipina tidak sah (*unauthorized*) tengah berada di AS. (manilatimes.net) imigran tersebut terancam dipulangkan, sementara mereka sendiri tidak lagi memiliki pekerjaan dan tempat tinggal di Filipina pasca badai.

Dengan alasan tersebut pemerintah Filipina secara resmi telah meminta kebijakan TPS ke *Department of Homeland Security* (DHS) AS melalui duta besarnya untuk AS, Jose L. Cuisia, Jr. pada tanggal 13 Desember 2013. Setelahnya pemerintah dan warga Filipina masih menunggu dikabulkannya permintaan tersebut, pada Agustus 2014 Cuisia Jr mengatakan bahwa permintaan TPS masih hidup. Selanjutnya ditahun 2015 dalam pertemuan di Los Angeles, Jeh Johnson, sekertaris dari DHS, mengatakan bahwa permintaan tersebut masih dipertimbangkan oleh AS. (philippineembassy-usa.org)

Penulis memilih Filipina karena selain kedekatannya dengan AS ditandai dengan dianggapnya Filipina sebagai aliansi dalam perang dunia ke II, jumlah korban dan kerugian ekonomi dari badai Yolanda di Filipina adalah yang terbesar diantara negara lain yang telah meminta namun belum mendapat persetujuan AS.

Tabel 1.2 Negara yang belum mendapat persetujuan TPS.

Negara	Tahun	Alasan	Kerugian dalam US\$	Korban Jiwa
Filipina	2013	Badai Yolanda	2,963,010,938	6,300
Guatemala	2010	Badai Agatha	982,000,000	174
Pakistan	2010	Banjir	440,000,000	1,781

(Sumber : data diolah dari berbagai sumber)

Seharusnya AS menyetujui permintaan TPS tersebut karena telah sesuai dengan salah satu ketentuan dalam *INA: ACT 244 (a) 4(b)* (terjadinya bencana alam) namun permintaan tersebut belum juga mendapat respon dari AS. Padahal beberapa negara lainnya seperti El Salvador, Guinea, Haiti, dan 10 negara lainnya tengah diberikan TPS oleh AS, dan delapan diantara negara tersebut juga memiliki alasan yang sama yaitu bencana alam. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul “Alasan penundaan *Temporary Protected Status* oleh Amerika Serikat terhadap imigran Filipina pada tahun 2013”

## **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

### ***Konsep Migrasi***

Definisi migrasi menurut UNESCO adalah pergerakan menyebrangi batas unit politik atau administratif untuk jangka waktu minimum tertentu. UNESCO membedakan dua jenis migrasi yaitu Migrasi Internal, yang mengacu pada pindah dari satu daerah dalam satu negara dan Migrasi Internasional, yaitu relokasi teritorial dari orang-orang antara negara-bangsa.

Kategorisasi umum untuk migran internasional adalah sebagai berikut : Migran Pekerja Sementara (*Temporary labour migrants*); Migran berkeahlian tinggi dan migran

pebisnis, (*Highly skilled and business migrants*). Migran gelap yang tak berdokumen atau migran ilegal (*undocumented / illegal migrants*); Migran yang terpaksa (*Forced migration*); Reunifikasi Migran atau Migran karena reuni keluarga (*family reunion / family reunification migrants*); dan Migran yang kembali (*Return migrants*). (unesco.org)

Di AS secara umum istilah imigran merujuk pada *Lawful Permanent Resident (LPR)* atau para pemegang *Green Card* namun *Immigration and Nationality Act (INA)* secara luas mendefinisikan imigran sebagai setiap orang asing (*alien*) di AS, terkecuali yang secara legal diakui dibawah kategori-kategori spesifik dari non imigran (*INA section 101(a) (15)*), Seperti diplomat, perwakilan asing, pelajar atau mahasiswa, perwakilan pers, peneliti dan sebagainya yang berasal dari luar negeri dan berada dibawah arahan pemerintah AS. (dhs.gov)

### ***Konsep Kepentingan Nasional***

Kepentingan nasional (*national interest*) secara konseptual, dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Untuk menjelaskan kepentingan nasional tersebut penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dari Hans J. Morgenthau yang mana Ia termasuk dalam aliran pemikiran realis dalam studi hubungan internasional. Realisme menganggap, bahwa sifat politik luar negeri hanya dapat dipastikan melalui pemeriksaan tindakan-tindakan politik yang dilakukan dan akibat yang dapat diduga dari tindakan-tindakan itu. Dengan demikian kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya yang dilakukan negarawan, dan dari dugaan kita akibat tindakan-tindakan mereka, kita dapat mengira apa yang mungkin menjadi tujuan mereka. (Morgenthau 2010:5)

Morgenthau secara sistematis merumuskan dan mendukung premis bahwa strategi diplomasi harus didorong oleh kepentingan nasional. Arti minimum yang inheren dengan konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*). Maka dalam kaitan ini Morgenthau mengatakan bahwa kemampuan minimum suatu bangsa adalah untuk melindungi identitas fisik, politik, dan identitas budaya mereka dari gangguan negara lain. (Sitepu 2011:163) Menurut Morgenthau terdapat 6 kepentingan nasional, yang antara lain adalah sebagai berikut : (Rosenau 1969:184)

- a) *Primary Interest*, yang termasuk didalamnya adalah proteksi dari kondisi fisik negara, politik, dan identitas budaya, termasuk didalamnya melindungi rezim sosial-ekonomi yang ada didalam negara; dan kemampuan bertahan melawan pelanggaran batas negara dari luar.
- b) *Secondary Interest* adalah sesuatu yang jatuh diluar point A diatas namun memiliki kontribusi kepadanya.
- c) *Permanent Interest*, adalah Kepentingan yang bersifat relatif tetap selama periode waktu yang lama, memiliki variasi bersama waktu, namun bersifat lambat.
- d) *Variable Interest*, adalah kepentingan yang memiliki fungsi seluruh persilangan dari pandangan personal, opini publik, kepentingan seksional, pendukung/faksi politik, dan politik dan tradisi moral rakyat (*moral folksaway*) yang diberikan negara dalam suatu waktu yang partikular untuk dipandang sebagai kepentingan nasional.

- e) *General Interest*, Adalah kepentingan yang dapat digunakan didalam gaya yang positif pada area geografis yang luas, kepada jumlah negara yang besar, atau dalam beberapa bidang lapangan yang spesifik (seperti ekonomi, perdagangan, pergaulan diplomatik, hukum internasional, dan sebagainya).
- f) *Specific Interest*, Adalah kepentingan-kepentingan spesifik yang mana tidak termasuk dalam point E. *Specific Interest* biasanya didefinisikan dengan waktu atau jarak dan biasanya adalah cabang logis dari general interest.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Di mana penulis berusaha menggambarkan dan memaparkan alasan yang menyebabkan belum diberikannya *Temporary Protected Status* untuk warga Filipina pasca pada tahun 2013.

### **Hasil Penelitian**

Badai Yolanda yang melanda Filipina di tahun 2013 menjadi penyebab bagi pemerintah Filipina untuk meminta kebijakan *Temporary Protected Status* (TPS) dari Amerika Serikat (AS), Pemerintah Filipina beserta lebih dari 200 organisasi masyarakat Filipina di AS menyatakan masih terus menunggu diberikannya persetujuan atas permintaan TPS tersebut namun sampai saat ini (2017) permintaan tersebut belum mendapat respon dalam bentuk penerimaan ataupun penolakan.

### ***Alasan AS menunda TPS untuk imigran Filipina***

Disebutkan didalam INA 1990 Sec. 224 (C) TPS diberikan jika *Attorney General* (setelah tahun 2002 otoritas telah dirubah ke sekretaris DHS) menemukan bahwa terdapat kondisi luar biasa dan sementara didalam negara asing yang menghambat orang asing dari negara tersebut untuk pulang ke negaranya dengan aman, kecuali AG menemukan bahwa dengan mengizinkan secara sementara orang asing tersebut akan bertentangan dengan kepentingan nasional AS.

Arti minimum yang inheren dengan konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*), dan kemampuan minimum suatu bangsa adalah untuk melindungi identitas fisik, politik, dan identitas budaya mereka dari gangguan negara lain, terkait dengan hal tersebut ada 3 adjektif yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan kepentingan nasional dari suatu negara. Berikut ini adalah analisis alasan penundaan TPS terhadap imigran Filipina pada tahun 2013 menggunakan konsep kepentingan nasional.

Disebutkan dalam INA 1990 Sec. 224 (C) TPS dapat diberikan jika AS melalui sekretaris DHS menemukan bahwa terdapat kondisi luar biasa dan sementara didalam negara asing yang menghambat orang asing dari negara tersebut untuk pulang ke negaranya dengan aman, namun dalam UU tersebut disebutkan pula bahwa TPS tidak akan diberikan jika dengan mengizinkan secara sementara orang asing tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional AS. Berikut ini adalah analisis alasan penundaan TPS terhadap imigran Filipina pada tahun 2013 menggunakan konsep kepentingan nasional.

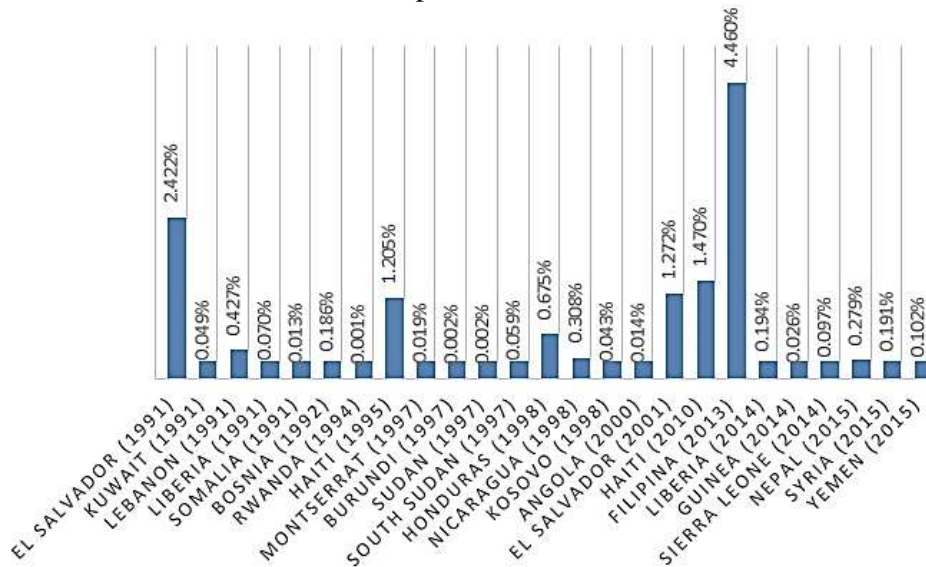
**Alasan Primary Interest.**

*Primary Interest* adalah kepentingan yang vital dan harus dijaga oleh suatu negara, termasuk didalamnya adalah perlindungan terhadap kondisi fisik, politik, identitas budaya, melindungi rezim sosial-ekonomi yang ada didalam negara dan bertahan dari pelanggaran batas ataupun gangguan dari luar wilayah. Penulis menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan *primary interest*, yang antara lain adalah :

*a. Kepentingan untuk menjaga kestabilan Perekonomian AS*

Salah satu alasan utama dalam penundaan TPS untuk Filipina adalah kepentingan ekonomi dari AS. Kepentingan tersebut terkait dengan tingginya jumlah pengangguran di AS pasca krisis ekonomi 2008 sehingga AS harus menjaga tersedianya lapangan kerja dengan mengutamakan warga negara AS, hal ini bertolak belakang dengan pemberian TPS yang akan memberikan izin penerimanya untuk bekerja. Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya imigran dari Filipina memiliki jumlah yang relatif besar dibanding kelompok imigran dari negara-negara lainnya, Imigran Filipina menempati posisi terbesar keempat di tahun 2013, yaitu 1,8 juta imigran yang mana diketahui dari jumlah tersebut 310,000 orang diantaranya termasuk dalam imigran ilegal.

Grafik 1.1 Perbandingan Persentase Imigran antara Filipina dengan Negara-Negara penerima TPS



(Sumber: *U.S. Census Bureau* dan *American Community Survey*)

Dapat dilihat dari grafik diatas dibandingkan seluruh negara yang pernah mendapat TPS Filipina memiliki jumlah imigran yang terbanyak, sehingga konsekuensi pemberian ini termasuk dampak negatifnya juga adalah akan menjadi terbesar dibanding pemberian-pemberian TPS sebelumnya.

Pemberian TPS untuk Filipina bertentangan dengan kepentingan ekonomi AS untuk menjaga tersedianya lapangan kerja demi kesejahteraan warga negara AS, para imigran dari Filipina cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi yang kemudian berdampak pada pekerjaan dan penghasilan yang relatif lebih baik jika dibanding

dengan keseluruhan imigran maupun dengan warga negara AS sehingga pemberian TPS yang mengizinkan penerimanya untuk bekerja secara legal di AS tersebut akan menimbulkan persaingan dan mempersulit warga negara AS untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, padahal pada tahun 2013 sendiri saat terjadi permintaan TPS dari Filipina, terdapat 10.4 juta warga negara AS yang tidak memiliki pekerjaan. (bls.gov)

Tingginya jumlah pengangguran di AS pada tahun 2013 diakibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2008, dampak dari krisis ekonomi tersebut merupakan yang terparah sejak terjadinya *Great Depression* tahun 1929.(usatoday.com) Krisis yang terutama disebabkan adanya masalah macetnya kredit perumahan dan utang luar negeri AS ini menyebabkan para pebisnis merubah rencana ekspansi perusahaan mereka yang juga berdampak pada tenaga kerja yang dampaknya masih cukup besar ditahun 2013 saat terjadi permintaan TPS dari Filipina tersebut.

Para warga negara asing yang masuk ke AS secara resmi saja tidak seluruhnya memiliki izin untuk bekerja karena aturan imigrasi AS hanya memberikan batasan sebanyak 140.000 izin untuk bekerja secara permanen di AS namun pemberian TPS akan membolehkan penerimanya untuk bekerja di AS, sebagaimana diketahui bahwa jumlah imigran Filipina adalah yang terbesar jika diberikan TPS maka hal tersebut tentu akan membuat kondisi yang semakin sulit bagi warga negara AS untuk mencari pekerjaan.

Kepentingan ekonomi termasuk salah satu alasan AS untuk tidak memberikan TPS bagi Filipina karena sebagaimana telah dibahas diatas pemberian TPS untuk Filipina tersebut akan bertentangan dengan kepentingan ekonomi AS terkait tersedianya lapangan kerja bagi warga Negara AS.

#### *b. Kepentingan AS Untuk Menangani Pelanggaran Batas oleh Imigran Ilegal*

Alasan lain yang termasuk dalam *primary interest* dalam penundaan TPS untuk Filipina berkaitan dengan pelanggaran batas kedaulatan wilayah khususnya akibat adanya imigran ilegal di AS. Kekuasaan negara untuk mengeluarkan dan menolak masuknya orang asing adalah bagian integral dari kedaulatan wilayah, namun hal ini bertentangan dengan pemberian TPS yang melindungi keberadaan imigran termasuk mereka yang masuk secara ilegal.

Keberadaan imigran ilegal ini menjadi masalah bagi AS karena bertentangan dengan hukum sehingga kemudian juga menimbulkan masalah berupa ancaman keamanan karena mereka tidak mengikuti peraturan yang telah diatur oleh kebijakan imigrasi AS. Keberadaan imigran ilegal tersebut juga sekaligus merupakan pelanggaran terhadap batas kedaulatan wilayah AS karena mereka masuk dan tinggal tanpa izin dari AS.

Tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh imigran ilegal sendiri lebih terbukti lebih tinggi dibandingkan imigran legal hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan Cato Institute yang menunjukkan bahwa persentase imigran ilegal 25% lebih banyak berada dipenjara dibanding imigran yang legal.(nationalreview.com) Selain itu keberadaan imigran ilegal juga mendapat pandangan negatif dari mayoritas masyarakat

AS, menurut survey yang dilakukan YouGov, mayoritas atau 92% masyarakat AS menganggap imigrasi ilegal sebagai masalah. Berbagai masalah diatas tersebut bertentangan dengan pemberian TPS karena sebagaimana telah dijelaskan Program tersebut juga melindungi para imigran ilegal yang masuk atau tinggal tanpa izin tersebut

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya masalah lain yang juga muncul dari pemberian TPS ini adalah program tersebut justru menambah jumlah imigran ilegal di AS karena banyak para imigran yang tidak meninggalkan AS saat status TPS mereka berakhir sehingga kemudian malah menambah jumlah imigran ilegal di AS. Terkait masalah imigran ilegal tersebut imigran Filipina sendiri merupakan salah satu negara dengan imigran ilegal (*undocumented*) terbesar di AS.

DHS sendiri tidak pernah menunjuk negara dengan persentase imigran ilegal diatas 1% sejak departemen tersebut didirikan dan memegang otoritas dalam pemberian TPS pada tahun 2002, sementara imigran ilegal dari Filipina sendiri secara persentase mencapai angka 3% dari seluruh populasi imigran ilegal di AS. DHS didirikan sebagai respon atas terjadinya serangan teroris “9/11” dan mengutamakan perspektif kepentingan nasional dalam menangani isu-isu imigrasi, dibawah DHS terdapat beberapa badan yang mengurus, mengawasi, dan memperketat imigrasi seperti *U.S. Customs and Border Protection (CPB)* dan *Immigration and Customs Enforcement (ICE)* yang mana memiliki tugas utama untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pengusiran (*removal*) yang biasanya melalui proses deportasi bukan malah melindungi para imigran ilegal seperti 310.000 imigran ilegal Filipina yang akan mendapat perlindungan dari deportasi bila TPS tersebut diberikan.

Sebagian besar dari imigran ilegal dari Filipina tersebut masuk ke AS secara resmi namun kemudian mereka tinggal melampaui tanggal izin visa yang mereka miliki (*overstay*) hal ini dapat diketahui karena Filipina tidak memiliki perbatasan darat sebagaimana yang umumnya dilalui oleh para imigran dari Amerika Tengah. Para imigran yang *overstay* ini menjadi perhatian dari AS karena mereka telah melampaui para imigran yang masuk tanpa pemeriksaan atau disebut dengan *enter without inspection (EWIs)*.

Diketahui sejak tahun 2007 jumlah imigran ilegal yang *overstay* telah melampaui imigran yang masuk tanpa pemeriksaan (EWIs), hingga tahun 2014 *overstay* menyusun 66% dari total imigran ilegal yang masuk di AS yang mana jumlah mereka mencapai sekitar 4.5 juta orang. (Robert Warren and Donald Kerwin p. 127) Terkait masalah tersebut AS bisa saja memperketat perbatasannya dengan meningkatkan keamanan berupa patroli atau membuat tembok pembatas untuk mereka yang EWIs namun untuk menghadapi mereka yang *overstays* sebagaimana yang dialami 310.000 imigran dari Filipina AS hanya dapat melakukan deportasi karena mereka awalnya memiliki izin resmi pada saat memasuki AS akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan pemberian TPS karena deportasi tidak dapat dilakukan bila imigran tersebut memiliki status TPS.

Berdasarkan hal-hal diatas dapat diketahui bahwa kepentingan AS untuk menangani pelanggaran batas kedaulatan wilayah merupakan salah satu alasan *primary interest* dari AS belum juga memberikan TPS bagi imigran Filipina.



**Alasan Variable Interest**

*Variable Interest* adalah kepentingan yang memiliki fungsi seluruh persilangan dari pandangan personal; opini publik; kepentingan sektional; pendukung/faksi politik; serta politik dan tradisi moral rakyat (*moral folksaway*) yang diberikan negara dalam suatu waktu yang partikular. Terkait dengan hal tersebut penulis menemukan adanya persilangan pendapat didalam masyarakat, dan juga kongres baik itu secara independen maupun juga terkait dengan partai.

*a. Persilangan Pendapat di Kongres Terkait Program TPS*

Program TPS yang awal terbentuknya disponsori oleh John Joseph Moakley (Anggota HOR dari partai Demokrat) ini menimbulkan persilangan, terutama diakibatkan kekhawatiran dari anggota kongres partai Republik yang mengatakan bahwa TPS dapat memberikan perlindungan “tak terbatas” dari deportasi. Pada Oktober 1990 William Mc. Collum (anggota kongres dari Partai Republikan Florida) telah merencanakan amandemen untuk menghapus program TPS, dengan alasan TPS dapat memberikan perlindungan pada imigran ilegal, namun rencana ini gagal karena kekalahan voting 131-285 di *House of Representatif*. (Bergeron 2014:30)

Bagan 1.1 Perbandingan Pendukung (cosponsor) pemberian TPS untuk Filipina

P. Demokrat		P. Republik	
Nama	Tanggal Dukungan	Nama	Tanggal Dukungan
Honda, Michael M	11/21/2013	Smith, Christopher H.	4/4/2014
Scott, Robert C. "Bobby"	11/21/2013		
Bordallo, Madeleine Z	2/26/2014		
Chu, Judy	2/26/2014		
Meng, Grace	2/26/2014		
Becerra, Xavier	2/26/2014		
Swalwell, Eric	3/26/2014		
Hanabusa, Colleen W.	3/26/2014		
Lowenthal, Alan S.	3/26/2014		
Waxman, Henry A.	3/27/2014		

(Sumber: Congress.gov)

Sebagaimana ditunjukkan bagan diatas, persilangan pendapat para anggota kongres itu masih terlihat hingga 21 September 2013, saat Al Green anggota HOR dari partai Demokrat memperkenalkan rencana pemberian TPS untuk imigran Filipina di kongres lewat “*Filipino Temporary Protected Status Act of 2013*”, RUU tersebut mendapat dukungan (*cosponsor*) dari 11 orang, yang mana 10 diantaranya datang dari anggota kongres dari partai Demokrat dan hanya 1 *cosponsor* dari anggota kongres partai Republik, RUU pemberian TPS untuk Filipina ini kemudian gagal untuk lolos di HOR.

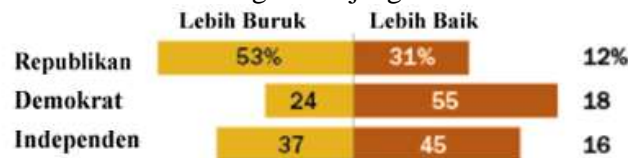
Ditahun 2014 dukungan kongres TPS untuk Filipina hanya sedikit meningkat yang mana ada 19 Senator AS yang mendesak DHS agar memberikan TPS untuk Filipina ([asianjournal.com](http://asianjournal.com)) dan dari Anggota HOR sendiri diketahui terdapat 35 anggota HOR yang memberikan dukungan serupa sebagaimana termuat dalam surat rekomendasi mereka untuk Jeh Jhonson (Sekretaris DHS ) pada Maret 2014, ([aila.org](http://aila.org)) akan tetapi

jumlah tersebut masih relatif kecil jika di bandingkan dengan total 100 anggota dari senat dan 435 anggota dari HOR yang ada di AS.(Jillson 2008:226)

*b. Persilangan pandangan Masyarakat AS terkait Imigran*

TPS sebagai program penangguhan deportasi sementara membuat para imigran yang menerimanya tetap bisa tinggal di AS meski mereka datang dengan cara ilegal ataupun *overstay* dari izin visa mereka, akibat dari hal tersebut AS akan kesulitan mengurangi dan mengatur jumlah kedatangan imigran karena sebagian penerimanya adalah imigran ilegal yang mana tinggal dan masuknya mereka tidak tercatat secara resmi, terkait dengan hal tersebut masyarakat AS sendiri terbelah dalam pandangannya mengenai kedatangan imigran.

Grafik 1.3 Pandangan Masyarakat AS Terkait Dampak Kedatangan Imigran Dalam Jangka Panjang.



Sumber : (Pew Research Centre)

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pandangan masyarakat AS terbagi dalam melihat isu kedatangan imigran, mayoritas dari masyarakat yang berafiliasi dengan partai Demokrat mengatakan bahwa imigran memberikan manfaat yang baik bagi AS, namun masyarakat yang berafiliasi dengan partai Republikan mengatakan sebaliknya, yaitu imigran memberikan dampak buruk bagi AS.

Grafik 1.4 Pandangan Masyarakat AS Terkait Jumlah Imigrasi Ke AS.



Sumber : (Pew Research Centre)

Dari grafik diatas diketahui bahwa terjadi perbedaan pandangan antara masyarakat yang berafiliasi dengan Partai Republik dan Partai Demokrat terkait apakah imigran harus dikurangi atau tetap pada level saat ini, namun secara keseluruhan diketahui mayoritas masyarakat AS menginginkan pengurangan jumlah imigrasi ke AS, hal tersebut bertentangan dengan realita yang terjadi sebagaimana termuat dalam tabel dibawah, sejak 1970 populasi imigran malah terus meningkat di AS. (migrationpolicy.org)

Tabel 1.5 Peningkatan Populasi Imigran di AS.

Tahun	Jumlah Populasi (juta)	Perbandingan total populasi
1970	9.6	4.7%
1980	14.1	6.2%
1990	19.8	7.9%
2000	31.1	11.1%
2010	40	12.9%
2014	42.4	13.3%

(Sumber : *U.S. Census Bureau dan American Community Survey* )

Terjadinya persilangan opini publik terkait imigran; keinginan mayoritas masyarakat terkait pengurangan tingkat imigrasi ke AS; serta kecilnya dukungan legislatif terhadap pemberian TPS bagi imigran Filipina, yang mana hal-hal tersebut termasuk dalam *variable interest* adalah termasuk dalam pertimbangan AS untuk tidak juga memberikan TPS bagi Filipina.

#### ***Alasan General Interest***

##### *Keentingan AS dalam kebijakan “Rebalance to Asia”*

Alasan lain dari penundaan TPS untuk Filipina adalah adanya alasan *general Interest* dari AS. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan AS di Filipina yang memiliki dampak ke berbagai bidang. Kebijakan “*Rebalance to Asia*” ini bertujuan untuk meluaskan dan mengintensifkan lagi peran AS di Asia Pasifik, adapun perhatian utama dari kebijakan tersebut berada di bidang keamanan hal ini disebabkan bangkitnya Cina sebagai kekuatan regional yang semakin berpengaruh yang mana berapa tindakanya telah mengganggu kepentingan AS dikawasan, seperti misalnya pada tahun 2012 Cina telah mendesak setiap kapal militer asing yang melintasi zona ekonomi eksklusifnya harus meminta izin khusus yang mana hal ini membuat AS mengkhawatirkan kebebasan bernavigasi di wilayah tersebut. Selain kebebasan navigasi AS juga memiliki kepentingan ekonomi karena diantara \$5.1triliun arus perdagangan yang melintasi laut Cina Selatan \$1.2 Triliun diantaranya tercatat sebagai transaksi AS terjadinya konflik dalam skala apapun adalah bertentangan dengan kepentingan AS tersebut.

Sebagai bagian dari strategi “penyeimbangan” di Asia, sejak akhir 2011 AS telah memiliki beberapa langkah yang antara lain adalah mengumumkan pengiriman pasukan ke Australia, mengirim angkatan laut yang baru ke Singapura, dan mendapatkan area kerja sama baru dengan militer Filipina. Kegagalan AS menjaga kestabilan dan tegaknya aturan hukum di kawasan tersebut dapat mengancam berbagai kepentingan AS di kawasan Asia, sehingga kebijakan AS untuk mengintensifkan kembali kehadirannya di kawasan Asia adalah sangat penting.

Filipina adalah salah satu negara utama yang menjadi tumpuan *general interest* AS di Asia yang mana sejak tahun 2013 Filipina telah memegang peran kunci dalam kebijakan AS dikawasan tersebut, hal ini khususnya disebabkan adanya sengketa maritim antara Filipina dan Cina. Setidaknya ada delapan lokasi di Filipina yang telah

diidentifikasi sebagai lokasi dimana pasukan, pesawat dan kapal perang AS akan dirotasi melalui serangkaian latihan militer, AS juga diketahui memiliki keinginan untuk kembali ke bekas pangkalan militernya di Subic dan Clark yang telah ditinggalkan AS pada tahun 1992 karena Filipina mengakhiri perjanjian tersebut.

Kepentingan-kepentingan AS di kawasan tersebut termasuk dalam *general interest* karena terkait dengan jumlah negara yang besar, dan berkaitan dengan beberapa bidang lapangan seperti ekonomi, kebebasan bernavigasi, pergaulan diplomatik, dan hukum internasional. *General Interest* dari AS tersebut merupakan salah satu alasan penundaan TPS untuk Filipina, karena AS lebih memfokuskan pemberian bantuan melalui pasukan militernya di Filipina karena hal ini dapat menjadi justifikasi kehadiran militer AS di Filipina.

AS awalnya menyumbang \$ 20 juta untuk AS dalam bentuk makanan dan barang-barang bantuan lainnya dan kemudian ditingkatkan menjadi \$ 37 juta. (USAID 2014:1) Pada November 2013 bantuan berupa barang tersebut didistribusikan oleh sekitar 13.000 tentara AS yang datang dengan 50 kapal perang dan pesawat angkatan udara AS. (globalresearch.ca) Berdasarkan data tersebut sangat terlihat bahwa AS ingin memberikan citra positif terkait kehadiran militernya yang hal tersebut memang bersesuaian dengan *general interest* AS di kawasan.

AS lebih memilih memberikan bantuan secara langsung yang disalurkan melalui perantara pasukan dan sarana militernya dari pada memberikan status TPS. Dengan memberikan bantuan humanitarian lewat pasukannya secara langsung AS berusaha menarik simpati masyarakat lokal Filipina agar dapat menerima dan mendukung peningkatan kehadiran militer AS di Filipina.

Sebelum badai, negosiasi antara AS dan Filipina terhambat pada isu kepemilikan peralatan dan instalasi-instalasi yang disediakan oleh AS diantar area-area yang tertutup, hal ini berdasar pada pandangan nasionalis yang memprotes karena menganggap AS hanya mengeksploitasi sengketa wilayah antara Filipina dan Cina untuk tujuan strategi AS sendiri.

Pasca bantuan lewat militer diberikan tanggapan positif mulai muncul, Alfred Romuldez walikota dari Tacloban (kota dengan dampak badai terparah) mengatakan hal tersebut sebagai sebuah ikatan pembaharuan khususnya untuk generasi selanjutnya. Setelah bantuan kemanusiaan diberikan lewat militer AS, orang-orang Filipina merasa lebih dekat dengan para pasukan AS yang telah memberikan peran penting didalam upaya pemulihan pasca badai Yolanda.

Hal tersebut memberikan hasil Pada akhir April 2014, Filipina dan AS menandatangani kerangka kerja persetujuan *Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)*. (Castro 2014:427) Persetujuan tersebut membolehkan AS menghadirkan tentaranya secara rotasional di kawasan Filipina yang mana efeknya AS dapat mengakses fasilitas-fasilitas militer di Filipina secara lebih ekstensif sejak ditutupnya Pangkalan Udara Clark dan Pangkalan Angkatan Laut Subic pada tahun 1990. Penandatanganan EDCA pada 28 April 2014 ini bahkan menjadi pusat dari kunjungan Presiden Obama di Asia yang sebelumnya telah lama tertunda. Bantuan yang diberikan AS secara langsung

melalui pasukan militernya terbukti lebih efektif untuk mencapai kesepakatan militer tersebut.

Pemberian bantuan secara langsung melalui militer ke Filipina lebih berpengaruh dan berkaitan dengan *general interest* AS khususnya dalam memberikan citra positif kehadiran militer AS khususnya di Filipina dan di kawasan pada umumnya, sehingga AS lebih memilih memfokuskan bantuan dengan cara tersebut dari pada memberikan TPS yang memiliki sejumlah kekurangan dan perdebatan, namun AS tidak bisa menolak begitu saja karena AS masih memiliki kepentingan untuk memberikan citra positif khususnya terkait kehadirannya di Filipina.

### **Kesimpulan**

Permintaan TPS oleh pemerintah Filipina disebabkan oleh terjadinya badai Yolanda yang merupakan salah satu badai terbesar dalam sejarah Filipina belum menerima respon baik itu penolakan atau penerimaan dari AS, padahal pada saat yang sama terdapat lebih dari 300.000 imigran tak berizin (*unauthorized immigrant*) dari Filipina yang terancam dipulangkan sementara mereka tak lagi memiliki tempat tinggal dan pekerjaan di negaranya. AS sendiri menyatakan bahwa TPS tidak akan diberikan jika bertentangan dengan kepentingan nasional dari AS. Melihat dari sudut kepentingan nasional penulis menemukan beberapa hal yang membuat AS menunda pemberian TPS untuk Filipina, yang antara lain adalah :

- 1) Alasan *Primary Interest* terkait kepentingan ekonomi karena program TPS memberikan izin tinggal dan bekerja sementara bertentangan dengan hal tersebut tingkat pengangguran di AS sendiri cukup tinggi pasca terjadinya krisis ekonomi sehingga pemberian TPS malah akan menimbulkan kondisi yang lebih sulit bagi warga negara AS untuk mendapat pekerjaan.
- 2) Alasan *Variable interest* yang mana ditemukan bahwa penundaan TPS untuk Filipina berkaitan dengan persilangan pendapat di kongres terkait program TPS dan persilangan pandangan masyarakat AS terkait imigran, persilangan tersebut muncul akibat perbedaan pandangan antara partai Demokrat dan partai Republik
- 3) Alasan *General Interest* terkait kepentingan AS dalam kebijakan AS dikawasan yang disebut "*Rebalance to Asia*" terkait munculnya kebijakan tersebut AS memusatkan perhatian pada kestabilan keamanan kawasan akibat munculnya ketegangan militer Cina di Laut Cina Selatan, hal tersebut memiliki implikasi terhadap *general interest* AS terutama kebebasan bernavigasi dan kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatan kawasan tersebut, sebagaimana diketahui Filipina adalah salah satu negara kunci dalam kebijakan tersebut maka dalam upaya AS untuk memperoleh simpati dan menjaga hubungan baiknya dengan Filipina membuat AS tidak dapat menolak TPS begitu saja melainkan memutuskan untuk menunda pemberiannya hingga saat ini (2017).

**Daftar Pustaka**

**Buku**

- Jillson, Cal. “*American Government - Political Change and Institutional Development*” (New York: Taylor & Francis Group, 2008)
- Morghentau, Hans J. “Politik Antar Bangsa” (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010 )
- Remini, Robert V. “*A Short History of the United States*” (New York: Harper Collins Publishers Inc, 2008)
- Rosenau, James N “*International Politic and Foreign Policy*” (New York: The Free Press, 1969)
- Sitepu, P. Anthonius “Studi Hubungan Internasional” (Yogyakarta: Graha Ilmu Edisi Pertama, 2011)

**Jurnal**

- Argueta, Carla N. 2016 “*Numerical Limits on Permanent Employment-Based Immigration: Analysis of the Per-country Ceilings*” (PDF) *Congressional Research Service* diakses pada 24 April 2017 pukul 17:00 <https://fas.org/sgp/crs/homesecc/R42048.pdf>
- Baker, Bryan And Nancy Rytina, 2013. “*Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States*” (PDF) [https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ois\\_ill\\_pe\\_2012\\_2.pdf](https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ois_ill_pe_2012_2.pdf) Diakses pada 20 Oktober 2016 Pukul 14:40
- Bergeron, Claire. 2014 “*Temporary Protected Status after 25 Years: Addressing the Challenge of Long-Term “Temporary” Residents and Strengthening a Centerpiece of US Humanitarian Protection*”. *Center for Migration Studies of New York - Journal on Migration and Human Security Volume 2 Number 1* (2014) (PDF) diakses pada 03 January 2017 di <http://jmhs.cmsny.org/index.php/jmhs/article/download/23/17>
- Castro, Renato Cruz De 2014 “*The 21st Century Philippine-U.S. Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA): The Philippines’ Policy in Facilitating*” (PDF) *The Korean Journal of Defense Analysis* Vol. 26, No. 4, December 2014, 427–446 P. 428 diakses pada 27 April 2017 pukul 19:00 <https://goo.gl/ewUCcL>
- National Disaster Risk Reduction and Managemen Council - Republic Philippines 2013 “Final Report re Effects of Typhoon Yolanda (Haiyan)”* (PDF) Diakses pada 23 Oktober 2016 pukul 10:00 di [http://ndrrmc.gov.ph/attachments/article/1329/FINAL\\_REPORT\\_re\\_Effects\\_of\\_Typhoon\\_YOLANDA\\_\(HAIYAN\)\\_06-09NOV2013.pdf](http://ndrrmc.gov.ph/attachments/article/1329/FINAL_REPORT_re_Effects_of_Typhoon_YOLANDA_(HAIYAN)_06-09NOV2013.pdf)

United States Agency International Development (USAID), 2014 "Philippines – Typhoon Yolanda/Haiyan" (PDF). [https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/philippines\\_ty\\_fs22\\_04-21-2014.pdf](https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/philippines_ty_fs22_04-21-2014.pdf)

Warren, Robert and Donald Kerwin "The 2,000 Mile Wall in Search of a Purpose: Since 2007 Visa Overstays have Outnumbered Undocumented Border Crossers by a Half Million" (PDF) diakses pada 23 April 2017 Pukul 16:00 <http://jmhs.cmsny.org/index.php/jmhs/article/download/77/67>

YouGov 2015 "Illegal Immigration" (PDF) diakses pada Kamis, 24 Maret 2017 Pukul 19:00 [https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus\\_uploads/document/zqz3kg39gt/tabs\\_OPI\\_Illegal\\_Immigration\\_20150902.pdf](https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/zqz3kg39gt/tabs_OPI_Illegal_Immigration_20150902.pdf)

### **Media Internet**

American Immigration Lawyers Association "House Letter to Secretary Johnson of DHS on TPS for Filipinos" Diakses pada 17 Februari 2017 pukul 20:00 <http://www.aila.org/advo-media/whats-happening-in-congress/congressional-updates/house-letter-to-sec-johnson-of-dhs-filipinos-tps>

Angeles, Steve. 2015 "Filipinos upset over stalled TPS" ABS-CBN North America News Bureau Diakses pada 22 Oktober 2016 Pukul 16:30 <http://news.abs-cbn.com/global-filipino/02/14/15/filipinos-upset-over-stalled-tps>

Auken. Bill Van, 2013 "The US Military and the Philippines" diakses pada 20 April 2017 pukul 14:00 <http://www.globalresearch.ca/the-us-military-and-the-philippines/5358909>

Congress.gov "Bill 3602" Diakses pada 10 April 2017 <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/3602/cosponsors>

Grovum, Jake 2013. "2008 Financial Crisis Impact Still Hurting States" diakses pada 12 Juli 2017 pukul 04:20 <https://www.usatoday.com/story/money/business/2013/09/14/impact-on-states-of-2008-financial-crisis/2812691/>

Hanlon, Atty. Daniel. 2014 "19 senators pressure White House-Kerry for Philippines' TPS" Diakses pada 17 Februari 2017 pukul 21:00 <http://asianjournal.com/immigration/19-senators-pressure-white-house-kerry-for-philippines-tps/>

Jens Manuel Krogstad 2015 "On views of immigrants, Americans largely split along party lines" *Pewresearch.org* Diakses pada 23 Oktober 2016 Pukul 08:00 <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/09/30/on-views-of-immigrants-americans-largely-split-along-party-lines/>

McNamara, Keith dan Jeanne Batalova "Filipino immigrants in the United States," *Migration Policy Institute* (2015). Diakses pada 20 September 2016 pukul 15:30 <http://migrationpolicy.org/article/filipino-immigrants-united-states.>

Migrationpolicy.org “ *US Immigrant Population by Country of Birth, 2000-Present*”  
Diakses pada 20 September 2016 pukul 15:30  
[http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/datahub/MPI-Data-Hub-Region-birth\\_1960-2015\\_1.xlsx](http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/datahub/MPI-Data-Hub-Region-birth_1960-2015_1.xlsx)

Nationalreview.com “*Good, Bad, and Emotional Arguments about Immigration*” diakses  
pada 3 Juni 2017 <http://www.nationalreview.com/article/446016/immigration-maryland-high-school-rape-case-emotion-makes-bad-policy>

Panti, Llanesca T. “*300,000 Filipinos in US face deportation*” Diakses pada 24 September  
2016 Pukul 14:00 <http://www.manilatimes.net/300000-filipinos-in-us-face-deportation/89999/>

*Philippine Embassy USA. “PH Seeks Additional Immigration Relief For Pinoys In US”*  
<http://www.philippineembassy-usa.org/news/3774/300/ph-seeks-additional-immigration-relief-for-pinoys-in-us/d,phildet/> Di Akses pada 27 September 2016  
Pukul 07:50

Tarrazona, Noel 2013 “*US Gives, China Withholds In Philippine Crisis*” diakses pada 22  
April 2017 pukul 13:00 [http://www.atimes.com/atimes/Southeast\\_Asia/SEA-01-131113.html](http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-131113.html)

UNESCO “*Social And Human Sciences*” unesco.org Di Akses pada 24 Maret 2016 pukul  
19:00 <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/>

USCIS “*Imigration And Nationality (INA) Act 244 - Temporary Protected Status*”  
USCIS.gov diakses pada 1 Desember 2016 Pukul 14:00  
<https://www.uscis.gov/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/0-0-0-1/0-0-0-29/0-0-0-7238.html>